

PERKEMBANGAN PERBUKUAN DI DAERAH

Minat Baca
Minat Baca
Minat Baca
Minat Baca

Minat Baca Minat Baca Minat Baca Minat Baca

n Direktorat budayaan n n emah Penerbit dan Percetakan

Distributor Konsumen

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PERKEMBANGAN PERBUKUAN DI DAERAH



Taya Paembonan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1997 Disusun oleh: Taya Paembonan

Informasi lebih lanjut dapat

menghubungi: Pusat Perbukuan

Jln. Gunung Sahari Raya No. 4

Jakarta Pusat

Diproduksi oleh Pusat Perbukuan melalui Bagian Proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca Jakarta Tahun Anggaran 1996/1997

Prakata

Perkembangan industri perbukuan di Indonesia saat ini masih mengalami berbagai kendala. Buku belum dianggap sebagai suatu kebutuhan. Akibatnya, minat masyarakat dalam membeli buku menjadi rendah. Hal itu terlihat dari data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1995 yang memperlihatkan pengeluaran rata-rata per kapita untuk bahan nonmakanan bahwa pada tabel itu tidak tertera secara khusus adanya pengeluaran untuk buku.

Perkembangan perbukuan pada tingkat daerah khususnya Dati I/provinsi mempunyai problematikanya sendiri. Sebagai suatu mata rantai, industri perbukuan mempunyai empat pilar utama, yaitu pengarang dan penerjemah, penerbit, distributor, dan konsumen. Keberadaan masing-masing pilar di masing-masing daerah berbeda satu sama lain.

Bagaimanakah keadaan perbukuan di daerah sesungguhnya dapat dibaca pada buklet ini.

Penerbit

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Tabel dan Daftar Bagan	vi
1. Pendahuluan	1
2. Perkembangan Industri Perbukuan di Daerah	3
3. Langkah-langkah Pengembangan	22
4. Penutup	30
Kepustakaan	33

Daftar Tabel dan Daftar Bagan

Tabel

Tabel 1 Peserta Sayembara Tahun 1988/1989 s.d. 1996/1997	5
Tabel 2 Data Jumlah Anggota Himpunan Pengarang Aksara 1988-1994	6
Tabel 3 Data Jumlah Anggota Ikatan Pengarang Indonesia (IPINDO) 1988-1994	7
Tabel 4 Perkembangan Jumlah Penerbit Anggota IKAPI 1973-1994	12
Tabel 5 Daftar Toko Buku di Seluruh Indonesia	16
Bagan	
Bagan 1 Hubungan Skematis Penerbitan dengan Percetakan	11
Bagan 2 Jalur Distribusi Buku yang Ideal	19

Perkembangan Perbukuan di Daerah*)

1. Pendahuluan

Problema industri buku di Indonesia sifatnya luas dan dalam. Demikian antara lain pernyataan Douglas Pearce dalam laporannya 23 tahun yang lalu (1973)**). Kebenaran pernyataan ini masih relevan untuk diungkapkan kembali mengingat kondisi dan perkembangan industri perbukuan Indonesia sampai saat ini masih mengalami berbagai masalah dan tantangan bahkan ada yang beranggapan memprihatinkan.

Harus diakui bahwa telah banyak kemajuan yang dicapai seperti jumlah penerbit Indonesia semakin banyak, toko buku semakin bertambah, mutu fisik buku semakin baik, namun tetap saja masalah-masalah perbukuan selalu muncul ke permukaan baik melalui media massa maupun pada seminar dan lokakarya perbukuan. Bahkan ada yang berpendapat masalah perbukuan ini tidak ada habishabisnya bagaikan lingkaran setan yang berputar-putar pada masalah yang itu-itu juga dari tahun ke tahun.

Dunia perbukuan sebagai suatu industri, produknya adalah buku yang merupakan barang yang diperdagangkan. Namun, buku tidak hanya sebagai barang dagangan biasa, tetapi harus pula dilihat sebagai sarana kultural dan menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Pada sisi inilah timbul berbagai persoalan mendasar yang mempengaruhi perkembangan industri perbukuan nasional. Kegemaran membaca buku yang relatif masih rendah di kalangan terbesar masyarakat Indonesia merupakan faktor yang dominan mempengaruhi kurangnya produksi buku di Indonesia.

^{*)} Pengertian Daerah dalam tulisan ini adalah Propinsi/Daerah Tk I.

^{**)} Douglas Pearce adalah ahli di bidang perbukuan yang ditugaskan Unesco untuk meneliti perkembangan perbukuan di Indonesia atas permintaan Pemerintah c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Oleh karena itu, untuk memajukan industri perbukuan Indonesia salah satu langkah strategis yang harus ditempuh ialah meningkatkan budaya gemar membaca di kalangan masyarakat. Tanpa adanya kegemaran membaca, buku tidak akan pernah dirasakan sebagai kebutuhan. Akibatnya, minat membeli buku menjadi prioritas paling akhir bahkan mungkin tidak pernah terpikir untuk membeli buku. Dengan demikian, industri perbukuan kita akan tetap berjalan di tempat, ataupun kalau ada perkembangan jalannya akan lamban sekali.

Jika kita simak data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1995 mengenai jenis pengeluaran rata-rata per kapita untuk bahan nonmakanan, tidak tertera secara khusus adanya pengeluaran khusus untuk buku dan mungkin hanya dimasukkan kedalam jenis pengeluaran aneka jasa dan barang. Hal itu berarti bahwa buku memang belum dirasakan sebagai kebutuhan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Di sisi lain, menurut data tersebut pesta dan upacara saja sudah ada pengeluaran khusus untuk itu.

Persentase pengeluaran rata-rat per kapita per bulan untuk bahan nonmakanan menurut jenis pengeluaran adalah sebagai berikut.

- 1. Perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air pada tahun 1984 (17,37%), 1987 (17,06%), 1990 (16,18%), dan 1993 (17,98%).
- 2. Aneka barang dan jasa pada tahun 1984 (8,26%), 1987 (9,98%), 1990 (10,81%), dan 1993 (11,67%).
- 3. Pakaian, alas kaki, dan jasa pada tahun 1984 (4,59%), 1997 (5,08%), 1990 (5,58%), dan 1993 (6,05%).
- 4. Barang tahan lama pada tahun 1984 (3,05%), 1987 (2,96%), 1990 (3,16%), dan 1993 (3,60%).
- 5. Pajak pemakaian dan premi asuransi pada tahun 1984 (0,88%), 1987 (1,08%), 1990 (1,19%), dan 1993 (1,37%).
- 6. Pesta dan upacara pada tahun 1984 (2,61%), 1987 (2,55%), 1990 (2,72%), dan 1993 (2,46%).

Bila diperhatikan hasil sayembara penulisan naskah yang diadakan oleh Pusat Perbukuan ternyata Kalimantan Timur dalam 9 tahun (1988/1989-1996/1997) mengikuti sayembara menghasilkan 63 naskah.

Gambaran tentang potensi penulis Kalimantan Timur tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain seperti tercermin pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 P'eserta Sayembara Tahun 1988/1989 s.d. 1996/1997

No.	Peserta Per Tahun	88/89	89/90	90/91	91/92	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	Jumlal
	Peserta/Propinsi										
1.	DI Aceh	3	7	17	30	26	33	41	29	12	198
2.	Sumatera Utara	0	2	6	3	2	8	13	12	13	59
3.	Sumatera Barat	9	15	19	11	3	4	33	15	13	122
4.	Riau	2	8	1	2	12	8	11	19	8	71
5.	Bengkulu	0	12	5	0	10	16	24	8	25	100
6.	Jambi	0	8	9	14	11	15	18	17	13	105
7.	Sumatera Selatan	0	16	23	33	9	17	50	19	16	183
8.	Lampung	1	5	14	6	16	30	25	20	14	131
9.	DKI Jakarta	0	11	10	14	10	11	9	7	14	86
10.	Jawa Barat	0	18	24	17	20	17	21	23	13	153
11.	Jawa Tengah	0	26	66	68	79	44	68	33	41	425
12.	D.I. Yogyakarta	0	16	19	36	31	45	37	25	19	228
13.	Jawa Timur	0	76	111	67	68	47	50	53	45	517
14.	Kalimantan Barat	5	9	10	31	20	30	25	11	23	164
15.	Kalimantan Selatan	10	10	16	3	15	4	21	1	9	89
16.	Kalimantan Tengah	7	7	4	7	6	21	6	15	3	76
17.	Kalimantan Timur	5	5	11	0	15	13	1	7	6	63
18.	Bali	6	11	20	51	36	55	50	14	18	261
19.	Nusa Tenggara Barat	34	16	33	31	27	23	38	17	44	263
20.	Nusa Tenggara Timur	28	0	18	14	10	- 11	21	7	18	127
21.	Sulawesi Selatan	8	8	12	0	15	28	34	8	15	128
22.	Sulawesi Tenggara	10	0	21	25	14	18	18	31	15	152
23.	Sulawesi Tengah	20	20	5	9	18	17	23	32	10	154
24.	Sulawesi Utara	7	7	5	7	28	19	24	15	13	125
25.	Maluku	12	12	10	10	12	14	0	6	9	85
26.	Irian Java	3	3	6	3	2	5	6	3	3	34
27.	Timor Timur	0	0	1	0	, 2	4	8	11	11	37
	Jumlah Peserta	170	328	496	492	517	557	675	458	443	4136

Legenda: Peserta per propinsi per tahun

Sumber: Data Rekapitulasi Jumlah Naskah Sayembara Tingkat Propinsi dari Pusat Perbukuan Pada sisi yang lain, ternyata bahwa penulis atau pengarang yang telah "mapan" dalam arti naskah yang ditulisnya sudah diterbitkan dan telah beredar di pasaran, penyebarannya tidak merata. Data pada Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan hal tersebut. Penulis-penulis ini tergabung dalam dua organisasi, yaitu Himpunan Pengarang Aksara dan Ikatan Penulis Indonesia (IPINDO).

Tabel 2 Data Jumlah Anggota Himpunan Pengarang Aksara 1988-1994

No.	Propinsi	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1.	DI Aceh	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	2	2	2	2	2	2	2
4.	Riau	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0
6.	Lampung	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bengkulu	1	1	1	1	1	20	20
8.	Jambi	0	0	0	0	0	0	0
9.	DKI Jakarta	80	80	79	79	79	79	79
10.	Jawa Barat	3	3	3	3	3	3	3
11.	Jawa Tengah	1	1	1	1	1	1	1
12.	DI Yogyakarta	1	1	1	1	1	1	1
13.	Jawa Timur	2	2	3	3	3	3	3
14.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kalimantan Barat1	1	1	1	1	1	1	
18.	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0
19.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0
21.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bali	0	0	0	0	0	0	0
23.	Maluku	0	0	0	0	0	0	0
24.	NTB	1	1	1	1	1	1	- 1
25.	NTT	0	0	0	0	0	0	0
26.	Timor Timur	0	0	0	0	0	0	0
27.	Irian Jaya	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	92	92	91	91	91	111	111

Sumber: Himpunan Pengarang Aksara, 1994

Pada sisi yang lain, ternyata bahwa penulis atau pengarang yang telah "mapan" dalam arti naskah yang ditulisnya sudah diterbitkan dan telah beredar di pasaran, penyebarannya tidak merata. Data pada Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan hal tersebut. Penulis-penulis ini tergabung dalam dua organisasi, yaitu Himpunan Pengarang Aksara dan Ikatan Penulis Indonesia (IPINDO).

Tabel 2 Data Jumlah Anggota Himpunan Pengarang Aksara 1988-1994

No.	Propinsi	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1.	DI Aceh	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	2	2	2	2	2	2	2
4.	Riau	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0
6.	Lampung	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bengkulu	1	1	1	1	1	20	20
8.	Jambi	0	0	0	0	0	0	0
9.	DKI Jakarta	80	80	79	79	79	79	79
10.	Jawa Barat	3	3	3	_3	3	3	3
11.	Jawa Tengah	1	1	1	1	1	1	1
12.	DI Yogyakarta	1	1	1	1	1	1	1
13.	Jawa Timur	2	2	3	3	3	3	3
14.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kalimantan Barat1	1	1	1	1	1	1	
18.	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0
19.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0
21.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bali	0	0	0	0	0	0	0
23.	Maluku	0	0	0	0	0	0	0
24.	NTB	1	1	1	1	1	1	1
25.	NTT	0	0	0	0	0	0	0
26.	Timor Timur	0	0	0	0	0	0	0
27.	Irian Jaya	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	92	92	91	91	91	111	111

Sumber: Himpunan Pengarang Aksara, 1994

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa hampir 71,1% penulis anggota Aksara berada di Jakarta. Keadaan yang sama, juga terjadi pada penyebaran anggota IPINDO sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini, di mana 38,6% berada di Jakarta.

Tabel 3 Data Jumlah Anggota Ikatan Pengarang Indonesia (IPINDO) 1988-1994

No.	Propinsi	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1.	DI Aceh	2	3	4	3	4	4	4
2.	Sumatera Utara	3	4	5	6	10	11	11
3.	Sumatera Barat	2	3	3	2	3	3	3
4.	Riau	3	4	5	4	5	5	5
5.	Sumatera Selatan	0	0	0	2	2	2	2
6.	Lampung	0	2	2	2	2	2	2
7.	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0
8.	Jambi	2	2	2	2	2	2	2
9.	DKI Jakarta	30	35	41	41	41	41	41
10. 11.	Jawa Barat Jawa Tengah	5 4	4	5 10	5 10	5 10	5 10	5 10
12.	DI Yogyakarta	2	2	2	2	2	2	2
13.	Jawa Timur	3	4	4	4	4	4	4
14.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kalimantan Timur	0	3	3	3	3	3	3
17.	Kalimantan Barat	2	2	2	2	2	2	2
18.	Sulawesi Utara	2	2	2	2	2	2	2
19.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Sulawesi Selatan	2	2	1	1	1	1	1
21.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bali	1	1	1	1	1	1	1
23.	Maluku	2	2	2	2	2	2	2
24.	NTB	1	1	1	1	1	2	2
25.	NTT	0	0	0	0	0	0	0
26.	Timor Timur	0	0	0	0	0	0	0
27.	Irian Jaya	- 1	-1	1	1	1	1	1
	Jumlah	68	88	97	97	104	106	106

Sumber: IPINDO, 1995

Penulis-penulis yang tergabung dalam kedua organisasi profesi tersebut di atas pada umumnya menghasilkan naskah buku fiksi dan nonfiksi. Buku-buku ini merupakan buku bacaan umum atau menjadi koleksi perpustakaan seperti perpustakaan sekolah. Seperti diketahui bahwa sejak tahun 1973 melalui Proyek buku bacaan Inpres SD, telah dibeli jutaan eksemplar buku-buku bacaan yang menjadi koleksi perpustakaan SD *). Dalam pengadaan tersebut ada kebijaksanaan bahwa kepada daerah yang diberi kesempatan untuk mengusulkan sebanyak 10% dari jumlah judul yang dibeli, yaitu buku-buku tradisional daerah. Kebijakan ini merupakan kesempatan bagi penulis daerah namun dalam kenyataannya terutama untuk daerah luar Jawa yang tidak memiliki penerbit tidak dapat menggunakan kesempatan tersebut.



b. Penerjemah

Tentang penerjemah tidak banyak yang dapat dikemukakan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sungguhpun telah ada organisasi penerjemah (Himpunan Penerjemah Indonesia), namun organisasi

ini belum memiliki cabang-cabang di daerah. Jumlah anggotanyapun belum terekam.

Secara potensial sebenarnya daerah memiliki kemampuan dibidang penerjemahan dengan adanya Perguruan Tinggi yang tersebar di semua propinsi. Namun, potensi ini belum berkembang karena berbagai kendala. Misalnya para dosen lebih senang menyusun diktat untuk para mahasiswanya ketimbang menyusun buku atau menerjemahkan buku; karena menyusun diktat jauh lebih mudah.

^{*)} Menurut data Pusat Perbukuan selama Repelita V telah diadakan sebanyak 77.129.613 eksemplar buku bacaan SD/MI yang dikirim ke seluruh SD/MI di Indonesia.

Persyaratan untuk menjadi seorang penerjemah yang baik pun cukup berat karena selain harus menguasai bahasa sumber dan bahasa penerima, juga harus menguasai teknik penerjemahan, serta ahli dalam bidang yang bersangkutan. Oleh karena itu, sering dikemukakan bahwa penerjemahan bukan sekadar pengalihan dari satu bahasa ke bahasa lainnya tetapi adalah suatu kegiatan lintas budaya (*Cross-Cultural Activities*) *)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka industri perbukuan di daerah dilihat dari dimensi penulis/pengarang dan penerjemah belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan itu tampaknya masih memerlukan waktu, melalui suatu upaya yang sistematis dan berkesinambungan serta simultan diantara pilar-pilar industri perbukuan lainnya.



c. Penerbitan

Perkembangan penerbit di Indonesia menampilkan suatu profil yang cukup menarik untuk dikaji, khususnya perkembangan penerbitan di daerah.

Dari data yang ada ternyata bahwa dalam kurun waktu 47 tahun sejak berdirinya Ikatan Penerbit Indonesia pada tahun 1950 sampai pada saat ini untuk sebagian besar daerah terutama luar Jawa belum memiliki penerbit komersial. Di samping itu, terjadi fluktuasi dalam jumlah penerbit anggota IKAPI dari satu periode ke periode berikutnya. Fluktuasi seperti ini menunjukkan bahwa industri penerbitan ini belum kokoh. Banyak penerbit yang berdiri hanya karena ada peluang bisnis yang menguntungkan. Kenyataan ini dapat diamati sejak adanya proyek Pengadaan Buku Bacaan Inpres tahun 1973. Karena jumlah eksemplar yang dibeli untuk setiap judul cukup besar bahkan pernah mencapai 160.000 per judul, maka banyak penerbit baru yang muncul namun kemudian hilang dari peredaran. Penerbit seperti ini dapat digolongkan sebagai penerbit "musiman."

^{*)} Drs. Oesman Rahman, Anggota BPPBN.

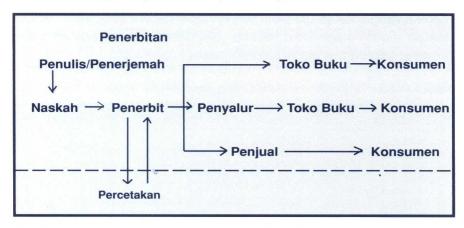
Lain halnya dengan sejumlah penerbit yang sejak berdirinya dilandasi oleh suatu visi dan misi yang jelas, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan martabat kemanusiaan. Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa produk penerbit berupa buku tidak hanya semata-mata dilihat sebagai barang dagangan biasa, tetapi sekaligus harus dipandang sebagai produk budaya. Oleh karena itu, penerbit yang semata-mata berorientasi bisnis akan menghentikan kegiatannya bilamana ternyata bahwa dari kegiatan penerbitan itu tidak mendatangkan keuntungan yang besar. Lain halnya dengan penerbit yang sejak semula telah ada misi dan visi yang jelas akan tetap berupaya dan bertahan sungguhpun hanya memperoleh keuntungan marginal.

Kenyataan lain yang sering dijumpai ialah anggapan sebagian orang kalaupun tidak sebagian besar yang tidak dapat membedakan antara penerbitan dan percetakan, padahal kedua profesi itu sangat berbeda. Bahkan anggapan inipun diantara orang-orang yang sudah terdidik sekalipun *)

Penerbit dipandang dari fungsinya adalah suatu badan yang mengolah naskah dari penulis atau penerjemah sehingga layak untuk diterbitkan melalui kegiatan editorial, ilustrasi, desainer atau pewajah buku. Dan dipandang dari sudut unit usaha penerbit adalah suatu badan usaha resmi yang bergerak di bidang penerbitan, perbanyakan, dan pengedaran buku dengan menanggung sendiri segala akibat dan resikonya, baik berupa resiko yuridis, maupun di segi ekonomis dan sosiologis.

^{*)} Pengalaman Sdr. Drs. Arselan Harahap, Direktur Penerbit LP3ES dalam mengunjungi suatu Lembaga Pendidikan Tinggi di suatu daerah luar Jawa menanyakan apakah Perguruan Tinggi ini memiliki penerbitan. Dijawab ya. Namun pada saat meninjau penerbitan yang dimaksud ternyata hanyalah suatu percetakan.

Di lain pihak percetakan berfungsi hanya untuk menggandakan naskah yang sudah diolah penerbit sehingga siap untuk digandakan melalui mesin cetak atas permintaan (order) penerbit. Hasil penggandaan itu dikembalikan kepada penerbit sesuai jumlah permintaan, untuk kemudian dipasarkan oleh penerbit yang bersangkutan. Secara skematis hubungan penerbitan dengan percetakan dapat digambarkan pada Bagan 1 berikut ini.



Bagan 1 Hubungan Skematis Penerbitan dengan Percetakan

Adanya salah kaprah yang menyamakan penerbitan dengan percetakan merupakan salah satu kendala tumbuhnya penerbit di daerah-daerah terutama di luar Jawa, mengingat industri percetakan (buku) memerlukan modal yang besar. Percetakan yang mampu mencetak buku memerlukan peralatan minimal seperti mesin potong, mesin jilid (kawat dan atau lem serta jahit benang), mesin lipat dan mesin cetak sendiri yang memenuhi standar tertentu. Mencetak buku berbeda dengan mencetak formulir, undangan, dan sebagainya.

Pandangan yang keliru tersebut di atas - penyamaan penerbitan dan percetakan - mengakibatkan keraguan mendirikan suatu penerbitan reolah-olah harus terlebih dahulu memiliki percetakan. Padahal ini tidak perlu. Mencetak naskah yang sudah diolah dan layak terbit dapat dilakukan oleh percetakan mana saja asal memenuhi standar untuk mencetak buku dan secara ekonomis menguntungkan.

Salah satu persoalan yang perlu dikaji ialah apakah perlu penerbit ada di setiap daerah? Apakah dengan jumlah penerbit yang ada sekarang (lihat Tabel 4) sudah cukup, sungguhpun penyebarannya tidak merata dan terbanyak hanya di kota-kota besar di Jawa khususnya Jakarta?

Jawaban atas persoalan ini akan berbeda. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan argumentasinya masing-masing. Bagi mereka yang tidak setuju akan berpendapat bahwa tidak perlu semua daerah memiliki penerbit, karena yang lebih penting adalah buku tersebar secara merata di seluruh pelosok tanah air.

Tabel 4 Perkembangan Jumlah Penerbit Anggota IKAPI 1973-1994

No.	Propinsi	1973	1978	1983	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1.	DI Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
2.	Sumatera Utara	8	10	14	14	14	15	15	16	16	20	20
3.	Sumatera Barat	9	7	8	6	6	4	4	4	4	4	5
4.	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
5.	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2
6.	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
7.	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
9.	DKI Jakarta	79	68	104	131	131	140	148	164	176	231	248
10.	Jawa Barat	21	19	23	32	34	35	40	44	60	71	87
11.	Jawa Tengah	22	25	26	29	29	30	34	34	41	50	51
12.	DI Yogyakarta	5	7	9	11	11	11	12	17	17	23	25
13.	Jawa Timur	16	19	21	25	25	30	32	32	36	57	59
14.	Kalimantan Selatan	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
18.	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Sulawesi Selatan	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0
22.	Bali	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3
23.	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	NTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25.	NTT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	Timor Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Irian Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	161	157	208	251	253	270	291	321	361	468	510

Sumber: IKAPI, 1995

Analog dengan pemikiran tersebut misalnya komoditi rokok yang telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air, menjangkau sampai ke seluruh sudut pedalaman sekalipun, sedang pabrik rokok hanya berpusat di beberapa tempat saja.

Sebaliknya bagi mereka yang setuju termasuk penulis berpendapat adalah ideal jika setiap daerah memiliki penerbitan, karena dengan adanya penerbit di daerah maka karya-karya penulis daerah lebih mudah diterbitkan ketimbang naskah mereka harus dikirim ke penerbit-penerbit di luar seperti yang dikeluarkan oleh pengarang Kalimantan Timur. Dalam pada itu untuk kepentingan pendidikan dengan adanya kurikulum muatan lokal maka kehadiran penerbit di daerah sangat diperlukan. Demikian pula upaya melestarikan warisan budaya daerah akan sangat dibantu bila ada penerbit karena karya-karya sastra daerah misalnya dapat diterbitkan.

Pertimbangan lain yang mendukung adanya penerbit di daerah ialah beban konsumen. Dalam binsis berlaku hukum bahwa semakin jauh jarak konsumen dari produsen akan semakin bertambah beban yang harus dipikul oleh konsumen. Ini berarti bahwa harga buku di daerah-daerah akan jauh lebih mahal yang justru pendapatan per kapita masyarakat jauh lebih rendah dibanding mereka yang berada di kota-kota tempat penerbit berada.

Namun, hal ini masih memerlukan penelitian karena benarkah harga buku terbitan daerah akan lebih murah karena jarak antara penerbit dan konsumen lebih dekat. Ataukah sebaliknya justru lebih mahal karena biaya produksi yang lebih tinggi mengingat bahan bakunya didatangkan dari luar terutama kertas.

Hal lain yang mendukung perlu adanya penerbitan daerah, ialah bahasa penerbitan. Di masa lampau banyak buku yang sudah diterbitkan dalam bahasa daerah, namun buku seperti itu semakin berkurang saat ini. Di samping itu, telah tersedia pula percetakan aksara daerah di beberapa tempat yang memungkinkan penerbitan tidak hanya dalam bahasa daerah tetapi juga sekaligus dalam aksara daerah.

Jenis penerbitan ini tentunya sulit untuk ditangani oleh penerbit komersial. Karena itu, Pemerintah Daerah bersama instansi-instansi di daerah perlu mengembangkan penerbit jenis ini. Tersedianya bukubuku dalam bahasa daerah untuk kepentingan penyuluhan kepada masyarakat di pedesaan tampaknya akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan buku-buku dalam bahasa Indonesia.



d. Percetakan

Percetakan telah berkembang secara merata ke semua propinsi di Indonesia. Percetakan-percetakan kecil, menengah, dan besar. Dilihat dari segi pengelolaannya percetakan dapat dibagi dalam 2

kategori, yaitu percetakan pemerintah dan percetakan komersial. Pembagian lain ialah percetakan nonpers dan percetakan pers.

Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah percetakan nonpers yang mampu mencetak buku, baik buku pendidikan maupun buku untuk masyarakat pada umumnya.

Percetakan yang mampu mencetak buku komposisi peralatan yang ideal adalah *)

- (1) mesin setting,
- (2) kamera reproduksi untuk membuat film,
- plate maker untuk kontak pelat cetak,
- (4) mesin cetak (1/2 plano, plano),
- (5) mesin potong kertas,
- (6) mesin jilid (benang, kawat atau lem),
- (7) mesin lipat,
- (8) mesin komplit untuk menyusun katern buku.

^{*)} Drs. F. Sitanggang, Kepala Pusat Grafika Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Perkembangan percetakan di daerah yang mampu mencetak buku ternyata sebagian besar percetakan tidak memiliki komposisi peralatan yang ideal.

Survei yang diadakan oleh Pusat Perbukuan dalam rangka kebijaksanaan desentralisasi pencetakan buku-buku pelajaran SD dan SLTP/SLTA, terutama untuk daerah di luar Jawa memberikan gambaran sebagai berikut.

Dari 110 percetakan yang disurvei ternyata yang memiliki mesin lipat hanya 8 percetakan atau $\pm 7\%$; mesin *perfect binding* (m e s i n lem panas) 15 percetakan atau $\pm 10,3\%$; mesin jahit kawat 40 percetakan atau sekitar 30,2%; sedang mesin potong lebih dari 80% percetakan (93 percetakan). Ukuran mesin cetak yang dimiliki ialah 1/2 plano sebanyak 53 percetakan atau sekitar 50%, 1 plano 15 percetakan atau 10,3%, dan web 4 percetakan atau $\pm 4\%$.

Dengan gambaran tersebut di atas maka percetakan yang mampu mencetak buku perlu terus dikembangkan untuk mendukung tumbuhnya penerbitan daerah terutama daerah luar Jawa sehingga sistem distribusi buku semakin dekat kepada konsumen.



e. Toko Buku

Menurut Gabungan Toko Buku Indonesia (GATBI)*), jumlah toko buku di Indonesia tercatat 2902 buah pada tahun 1995. Dari jumlah tersebut penyebarannya tidak merata, yaitu 1.727 buah (59.6%)

ada di Jawa, 642 buah (22,1%) di Sumatera, 133 buah (4,5%) berada di Kalimantan, 211 buah (7,2%) di Sulawesi, dan sisanya 189 buah (6,5%) tersebar di Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur. Secara rinci jumlah toko buku per propinsi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

^{*)} Sebelumnya organisasi ini bernama Persatuan Pedagang Buku Indonesia (PPBI).

Tabel 5 Daftar Toko Buku di Seluruh Indonesia

NO.	Propinsi	Jumlah Toko Buku
1.	Daerah Istimewa Aceh	72
2.	Sumatera Utara	149
3.	Sumatera Barat	131
4.	Riau	116
5.	Sumatera Selatan	55
6.	Lampung	44
7.	Bengkulu	31
8.	Jambi	44
9.	DKI Jakarta	346
10.	Jawa Barat	424
11.	Jawa Tengah	445
12.	Daerah Istimewa Yogyakarta	38
13.	Jawa Timur	474
14.	Kalimantan Selatan	35
15.	Kalimantan Tengah	26
16. Kalimantan Timur		28
17.	Kalimantan Barat	44
18.	Sulawesi Utara	44
19.	Sulawesi Tengah	26
20.	Sulawesi Selatan	128
21.	Sulawesi Tenggara	13
22.	Bali	43
23.	Maluku	42
24.	Nusa Tenggara Barat	40
25.	Nusa Tenggara Timur	39
26.	Timor Timur	8
27.	Irian Jaya	17
	Jumlah	2902

Sumber: Gabungan Toko Buku Indonesia, 1995

Dari jumlah toko buku yang berada di setiap propinsi penyebarannyapun tidak merata. Lebih banyak toko buku berada di ibukota propinsi, dan hanya sebagian kecil berada di ibukota kabupaten dan kecamatan. Bahkan mungkin di banyak ibukota kecamatan belum ada toko buku atau kios buku.

Toko buku yang ada terutama di daerah, rata-rata kecil itupun tidak hanya buku yang dijual. Masih ada barang-barang lainnya seperti alat tulis kantor, alat pendidikan lainnya, kaset bahkan pula mainan anak-anak. Barang-barang ini sebagai mata dagang komplementer bagi toko buku yang memungkinkan toko-toko buku itu dapat berjalan secara rutin.

Permasalahan yang dihadapi toko buku selain permodalan juga buku termasuk mata dagangan yang perputarannya sangat lamban (slow moving business)*). Oleh karena itu, usaha perdagangan buku tidak menarik para pengusaha. Bukupun tidak dapat dijadikan agunan untuk memperoleh kredit dari bank.

Bila kita mengamati jenis buku yang dijual di toko buku di daerah pada umumnya didominasi oleh buku-buku sekolah mulai dari buku SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Sedangkan untuk buku umum, kecil jumlahnya. Fenomena ini merupakan salah satu indikator bahwa memang buku belum memasyarakat. Buku seolah-olah hanya untuk anak sekolah dan mahasiswa.

Dominannya buku-buku sekolah di toko buku karena buku ini perputarannya relatif lebih cepat dibandingkan dengan buku untuk masyarakat umum sungguhpun hanya waktu tertentu saja, yaitu pada saat tahun ajaran baru atau penggantian triwulan atau semester. Karena hampir semua toko buku menjual jenis buku yang sama maka persainganpun di antara mereka semakin ketat.

^{*)} Candra Budiyono dari GATBI dalam Seminar Pengembangan Perbukuan di Daerah pada tahun 1993 di Banjarmasin.

Toko buku berperan sebagai penghubung antara produsen (penerbit) dengan konsumen (pembaca buku). Jika kita simak peran itu, maka pada satu sisi toko buku adalah usaha dagang untuk memperoleh keuntungan namun pada sisi yang lain ia mengemban misi idealisme yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti telah dikemukakan di depan bahwa buku bukan sekadar barang dagangan biasa, tetapi sekaligus sebagai sarana kultural dalam rangka pendidikan bangsa. Buku juga sebagai sarana demokratisasi pengetahuan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, semakin berkembang toko buku yang dibarengi dengan merata penyebarannya sampai ke tingkat kecamatan bahkan sampai ke desa maka akses masyarakat terutama peserta didik terhadap buku akan semakin dipermudah.

Hubungan antara toko buku dengan penerbit tidak selamanya dalam keadaan yang ideal. Di kalangan penerbit ada yang beranggapan bahwa toko buku kurang aktif dalam memasarkan bukubuku hasil terbitannya dan hanya menunggu pembeli. Akibatnya hanya buku yang laris saja yang cepat terjual sedang buku yang kurang laris akan tertumpuk di toko buku.

Dengan timbulnya keraguan di kalangan penerbit terhadap kemampuan toko buku, maka dalam 10 tahun terakhir pada penerbit (tidak semua penerbit) mengubah strategi pemasaran buku-bukunya. Toko buku tidak lagi berperan sebagai jalur utama pemasaran oleh penerbit.

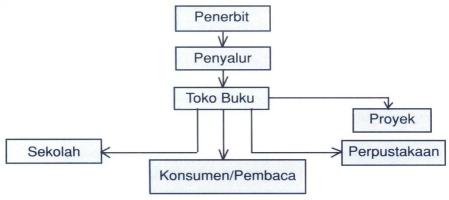
Penerbit mengerahkan armada sendiri (sales) dengan mendirikan perwakilan-perwakilan di daerah untuk memasarkan buku langsung ke konsumen, terutama untuk buku-buku sekolah. Akibatnya peranan toko buku menurut sinyalemen Ketua IKAPI Cabang Jawa Tengah tinggal 10%*) dari seluruh omzet penjualan baik buku umum dan terutama buku pelajaran.

^{*)} Agung Sasongko, Ketua IKAPI Cabang Jawa Tengah.

Dengan perubahan strategi pemasaran tersebut di atas, maka mata rantai jalur distribusi buku komersial di daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penerbit —> penyalur —> toko buku —> pengedar —>konsumen
- b. Penerbit --- penyalur --- toko buku --- konsumen
- c. Penerbit --> toko buku --> konsumen
- d. Penerbit —> armada sales/perwakilan penerbit —> konsumen

Dipandang dari sudut kepentingan konsumen jalur terakhir secara teoretis akan lebih efektif dan akan menyerap banyak tenaga kerja. Pertanyaan yang muncul ialah sejauh mana pola ini akan langsung mengingat kondisi geografis di daerah medannya cukup sulit terutama kawasan Indonesia bagian timur yang terdiri atas ribuan pulau dengan jalur transportasi melalui laut dan sungai. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan suatu pengkajian yang konprehensip dalam rangka mencari sistem distribusi yang ideal tentang penyebaran buku di Indonesia. Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) telah merekomendasikan jalur distribusi yang dianggap ideal (lihat Bagan 2)", namun apakah semua pelaku perbukuan sudah siap menerimanya?



Bagan 2 Jalur Distribusi Buku yang Ideal *)

^{*)} Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional, Rekomendasi Badan Pertimbangan Buku Nasional 1979 - 1989, hal 177, Jakarta 1993.

"Jawabannya pasti ragu-ragu, karena keadaan sekarang belum kondusif untuk mengikuti jalur distribusi yang ideal tersebut.Untuk ini, diperlukan kesadaran etika bisnis yang tinggi dan kerjasama saling mendukung dari masing-masing pelaku bisnis" demikian pendapat Candra Budiyono dalam seminar Perbukuan di Banjarmasin.

Dampak dari penjualan langsung oleh penerbit ke konsumen adalah banyak toko buku yang menghentikan kegiatannya dan beralih ke usaha lain. Toko buku tidak mampu bersaing dengan penerbit. Kesimpulan ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Kalimantan Selatan dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Pengembangan Perbukuan Daerah Februari 1993, di Banjarmasin: Antara lain dikemukakan sebagai berikut.

"... masuknya penerbit ke daerah (maksudnya Kalimantan Selatan - penulis) dan langsung memasarkan produk mereka melalui sekolah-sekolah yang terjadi sejak tahun 1988 sampai sekarang, maka hal ini membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan toko buku di daerah. Dari data yang diperoleh melalui gabungan Toko Buku Indonesia (GATBI) Cabang Kalimantan Selatan terdaftar 50 (lima puluh) buah toko buku, sedangkan pada tahun 1993 awal ini jumlah tersebut menurun menjadi tinggal 25 (dua puluh lima) buah ... Omzet penjualan toko buku tersebut dari tahun ke tahun terus menurun ... omzet penjualan buku pelajaran yang biasa, pada saat ini hanya tinggal 10% sampai 30% saja yang dapat dipasarkan oleh toko buku sehingga keuntungan semakin menurun dan hal inilah yang menyebabkan banyaknya toko buku (kurang lebih 50%) yang ada di Kalimantan Selatan terpaksa menutup usahanya karena ketidakmampuannya usaha untuk biaya operasionalnya.

..... Dikhawatirkan jumlah penerbit yang masuk ke daerah akan terus bertambah dan lambat laun akan mengancam kelangsungan usaha toko buku di daerah."*)

^{*)} Kanwil Perdagangan Kalimantan Selatan, Pengembangan Perbukuan di Daerah, hal 28 - 29, Jakarta 1993.

Keadaan yang dialami oleh toko buku Kalimantan Selatan tidak jauh berbeda dengan keadaan toko buku di daerah lain. Oleh karena itu, ada rekomendasi dari 3 seminar yang diadakan di tiga daerah, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Ujung Pandang tentang mekanisme pendistribusian sebagai berikut.

"Untuk menciptakan suasana yang harmonis antara penerbit, penyalur, toko buku, dan konsumen, mekanisme pendistribusian buku yang berlaku selama ini perlu diaktualisasikan. Mekanisme pendistribusian buku yang disarankan adalah penerbit, penyalur, toko buku baru ke proyek, sekolah/perpustakaan dan masyarakat. Perlu segera disusun secara tertulis kode etik mekanisme pendistribusian buku."*)

Peranan toko buku dalam rangka pengembangan perbukuan di daerah sangat strategis karena melalui toko bukulah penyebaran buku secara merata di seluruh tanah air akan dapat terlaksana. Adanya penerbit yang saat ini langsung ke konsumen hanyalah merupakan "gejala sementara" yang diakibatkan oleh situasi perbukuan nasional dewasa ini, di samping pengelolaan toko buku pada umumnya belum profesional.

Dalam rangka demokratisasi pengetahuan dan pemberantasan kebodohan masyarakat serta peningkatan proses pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan, pengembangan toko buku di daerah

^{*)} Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pengembangan Perbukuan di Daerah, hal 35, Jakarta 1993.

hendaknya menjadi kepedulian semua pihak. Penerbit dan toko buku harus menjalin kerja sama dan saling pengertian. Karena kedua profesi ini mempunyai saling ketergantungan yang erat. Perkembangan toko buku akan mendorong perkembangan penerbitan baik kuantitas maupun kualitas.

Pemerintah daerah bersama jajarannya dan instansi vertikal yang ada kaitannya dengan perbukuan hendaknya ikut mendorong tumbuhnya toko buku mengingat misi yang diembannya.

Untuk kepentingan bersama hendaknya toko buku yang ada di daerah, menggabungkan diri dalam wadah Gabungan Toko Buku Indonesia (GATBI), karena menurut GATBI Pusat baru ada 13 daerah yang membentuk Cabang GATBI.

3. Langkah-langkah Pengembangan

Telah dikemukakan berbagai kendala dan tantangan mengenai perkembangan perbukuan di daerah. Persoalannya sekarang adalah langkah apa yang harus diambil untuk mendorong pertumbuhan perbukuan daerah.

Berikut ini akan disampaikan beberapa pemikiran awal dalam rangka mendorong perkembangan perbukuan di daerah.

a. Meningkatkan Budaya Baca

Meningkatnya budaya baca masyarakat berarti buku akan dirasakan sebagai suatu kebutuhan sama seperti kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian, masyarakat akan terus-menerus mencari buku untuk dibaca atau dengan kata lain membaca buku menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Mengingat budaya gemar membaca cakupannya sangat luas dan kompleks, maka langkah pertama yang paling memungkinkan ialah meningkatkan budaya baca melalui lingkungan lembaga pendidikan formal baik jalur sekolah (TK sampai dengan Perguruan Tinggi) maupun jalur luar sekolah (kursus-kursus).

Petunjuk teknis peningkatan budaya gemar membaca untuk para siswa dalam waktu dekat akan dikirimkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Pusat Perbukuan ke sekolahsekolah di seluruh tanah air adalah langkah strategis karena meningkatnya budaya gemar membaca para siswa mempunyai dampak berantai (*multiply effect*) terhadap budaya gemar membaca masyarakat dan dunia perbukuan sendiri. Dalam buku petunjuk tersebut telah diatur tugas-tugas dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah, guru, pustakawan sekolah, pengawas, masyarakat lingkungan sekolah khususnya BP-3, dan oleh siswa sendiri.

Keberhasilan petunjuk ini sangat tergantung pada kepedulian dan komitmen dari semua pihak di sekolah untuk melaksana-kannya.

Sungguhpun ada pendapat yang beranggapan bahwa sekolah tidak dapat diandalkan*) untuk meningkatkan kegemaran membaca buku, namun juga tidak dapat diingkari bahwa kebiasaan - kebiasaan yang terlatih sejak muda termasuk kebiasaan membaca buku di sekolah akan berlanjut dan mewarnai perilaku seseorang di kemudian hari. Bahkan di masyarakat yang sebagian besar penduduk belum mengenal baca tulis, justru para siswa berperan penting dalam memperkenalkan buku kepada orangtua mereka dan tidak tertutup kemungkinan justru mereka mengajar baca tulis kepada orangtuanya.

^{*)} Pater Drost, dalam makalah beliau pada Simposium Perbukuan Nasional yang diadakan oleh Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional, Jakarta 1996.

Dampak dari tumbuhnya kegemaran membaca di kalangan siswa ialah diperlukannya buku dalam jumlah yang besar. Jika kita berhitung secara matematis katakanlah setiap siswa pendidikan dasar membaca 1 buku bacaan saja dalam setahun, maka akan diperlukan paling tidak 32,4 juta eksemplar per tahun. Menurut statistik jumlah murid SD pada tahun 1994/1995 ada 26,2 juta dan SLTP 6,2 juta *). Belum lagi termasuk buku pelajaran yang jumlahnya akan jauh lebih besar karena jumlah mata pelajaran di SD dan SLTP menurut kurikulum1994 adalah 9 dan 10 mata pelajaran. Itu berarti paling tidak diperlukan buku pelajaran sebanyak 9 x 26,2 juta ditambah 10 x 6,2 juta sama dengan 297,8 juta eksemplar.

Memperhatikan angka-angka di atas, industri perbukuan di Inuonesia termasuk di daerah-daerah memiliki peluang dan potensi yang besar untuk berkembang. Namun kenyataannya, sampai saat ini industri perbukuan tetap "merana" dan "mengerang" di tengahtengah gemuruhnya kemajuan industri yang sangat besar di sektor lain.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kegemaran membaca di kalangan masyarakat di daerah akan menjadi pendorong utama untuk tumbuhnya berbagai perbukuan seperti penulis, penerbit, toko buku, dan lain-lain di daerah.

b. Penulis Daerah

Di depan telah dikemukakan bahwa daerah memiliki potensi untuk menghasilkan naskah-naskah. Namun, karena tidak ada penerbit di daerah yang akan menerbitkan dan belum mampu bersaing dengan penulis-penulis terutama di Jawa yang mempunyai

^{*)} Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan di Indonesia, hal 284, 288, Jkt, 1995.

banyak penerbit maka langkah-langkah yang dapat dikembangkan antara lain dengan meningkatkan kualitas naskah yang dihasilkan penulis daerah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Pelatihan penulis yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pusat Perbukuan secara bergiliran di propinsi merupakan langkah awal yang perlu diteruskan dengan penyempurnaan dan peningkatan mutu pelaksanaannya. Demikian juga organisasi-organisasi profesi penulis yang ada, seyogianya ada program untuk melatih penulis-penulis daerah tidak hanya bagi anggota mereka tetapi terbuka untuk umum. Dengan meningkatnya mutu naskah yang dihasilkan oleh penulis daerah akan mampu bersaing dengan naskah-naskah penulis dari daerah lain khususnya di Jawa yang memiliki banyak penerbit.

Khusus untuk kurikulum muatan lokal seyogianya penulis-penulis daerah diberi kesempatan untuk menyusun naskahnya. Naskahnaskah tersebut dengan bantuan finansial Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah cq. Dinas P dan K untuk penerbitannya.

Demikian juga cerita-cerita rakyat yang banyak terdapat di masyarakat dapat digarap oleh penulis daerah untuk kemudian diterbitkan. Cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai luhur perlu dilestarikan. Banyak kearifan dapat diturunkan dalam cerita rakyat itu. Cerita-cerita ini akan menjadi bacaan yang menarik bagi anakanak terutama murid-murid sekolah dasar. Jika cerita rakyat ini telah dapat diterbitkan, maka tidak hanya anak daerah itu yang dapat membacanya tetapi juga anak-anak di lain daerah. Oleh karena itu, cerita rakyat ini seyogianya ditulis dalam bahasa Indonesia.

Bagi daerah tertentu yang bahasa daerahnya telah berkembang dengan baik sehingga bahasa itu tidak hanya berupa ragam lisan tetapi juga telah menjadi ragam tulis, cerita rakyat dapat diterbitkan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Bahkan mungkin dalam aksara daerah yang bersangkutan.

c. Penerbitan

Adalah ideal jika semua daerah memiliki penerbit. Tetapi pengalaman menunjukkan, sampai tahun 1995 masih ada 11 daerah (propinsi) yang belum memiliki penerbit dan 9 daerah hanya memiliki 1 atau 2 penerbit anggota IKAPI.

Mendorong tumbuhnya penerbit komersial di daerah masih sulit karena penerbit tidak hanya menggunakan misi idealisme tetapi sebagai industri juga harus memperhatikan peluang bisnis yang menguntungkan. Pengusaha masih akan berpikir seribu kali untuk menanamkan modalnya di bidang penerbitan buku selama bisnis buku perputarannya sangat lamban.

Memperhatikan hal tersebut di atas langkah yang mungkin dapat dilakukan ialah penerbit yang sudah berpengalaman dan relatif sudah kuat baik dari segi permodalan maupun manajemen mendirikan cabang di daerah yang belum memiliki penerbit. Pendirian cabang tersebut harus dalam perspektif bahwa suatu saat dapat berdiri sendiri tetapi tetap sebagai anggota group induknya. Terwujudnya langkah ini diperlukan dorongan dan dukungan dari pemerintah di daerah. Daerah dan instansi vertikal yang terkait di daerah seperti Kanwil Depdikbud, Kanwil Agama, Perpustakaan Daerah, Kanwil Perindustrian dan Perdagangan. Bentuk konkret dukungan tersebut misalnya dalam hal pengadaan buku perpustakaan diprioritaskan terbitan cabang tersebut. Dengan semakin berkembangnya pelaksanaan azaz desentralisasi dalam berbagai bidang, akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pendirian suatu cabang penerbit atau penerbit di daerah.

Langkah lain yang memungkinkan ialah Universitas atau Institut mendirikan unit penerbitan (*University Press*). Unit penerbitan ini dapat menerbitkan hasil-hasil penelitian yang diadakan oleh dosen atau lembaga penelitian Universitas/Institut yang bersangkutan. Dilihat dari sumber daya manusia yang menghasilkan naskah, cukup tersedia baik karangan asli maupun terjemahan. Yang masih perlu dipelajari ialah seluk beluk dan manajemen penerbitan. Penerbitan

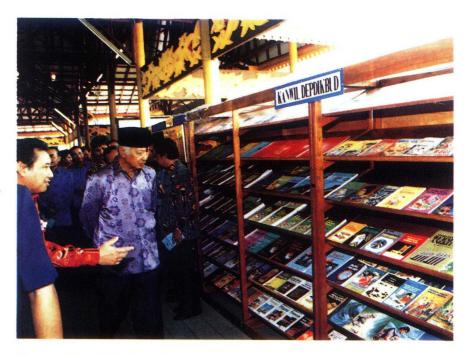
universitas ini harus dikelola secara bisnis dan profesional sehingga mampu bersaing dengan penerbit-penerbit komersial. Iapun harus terbuka untuk menerima naskah-naskah yang memang dibutuhkan pasar seperti buku bacaan untuk perpustakaan-perpustakaan sekolah dan perpustakaan lainnya. Untuk itu, perlu ada kerjasama dengan instansi yang ada kaitan langsung dengan masalah perbukuan seperti Kanwil Depdikbud, Kanwil Agama, dan lainlain. Unit penerbitan universitas/Institut tidak perlu memiliki percetakan sendiri yang memerlukan modal yang cukup besar. Dengan kemajuan teknologi di bidang grafika akan memudahkan Universitas dan Institut untuk mendirikan suatu unit penerbitan. Perangkat komputer yang dimiliki oleh setiap Universitas dan Institut akan sangat membantu berdirinya penerbitan universitas.

d. Toko Buku

Penyebaran toko buku sudah lebih merata di seluruh Indonesia (lihat Tabel 6) dibandingkan dengan penerbit. Untuk lebih mendorong perkembangan itu, kendala yang dihadapi toko buku seperti penerbit langsung ke konsumen, pengelolaan toko buku yang pada umumnya masih tradisional, permodalan yang lemah secara bertahap harus diatasi. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Peranan toko buku harus diperkuat dengan melibatkan toko buku dalam pengadaan bahan pustaka oleh Pemerintah c.q. Proyek seperti perpustakaan sekolah, daerah, umum, dan desa.
- 2) Manajemen dan kinerja toko buku hendaknya semakin profesional sehingga kepercayaan penerbit semakin besar. Jika keluhan penerbit selama ini bahwa "toko buku menunggu pembeli" maka harus diubah menjadi "toko buku mencari pembeli". Untuk itu, toko buku perlu mengadakan kegiatan promosi melalui penyebaran katalog terbitan baru dari para penerbit atau ikut serta dalam pameran buku atau bentuk kegiatan lain sesuai dengan kondisi daerah.

3) Toko buku perlu mengetahui kebutuhan pasar sehingga dapat menyediakan buku-buku yang diminati dalam jumlah yang cukup. Salah satu daya tarik toko buku bilamana dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen. Toko buku akan ditinggalkan pembeli bila setiap kali pembeli datang ke suatu toko buku selalu tidak menemukan buku yang diperlukannya. Toko buku hendaknya mengembangkan dirinya sehingga menjadi toko buku serba ada.



Pameran buku di Pontianak dalam rangka pencanangan bulan buku 2 Mei 1995 (Foto: Esti)

4) Perlu didirikan Gabungan Toko Buku GATBI di daerah yang belum memilikinya. Menurut GATBI Pusat sampai dengan tahun 1995 baru berdiri 13 (tigabelas) Cabang GATBI di daerah. Dengan adanya GATBI maka dapat dilakukan kegiatan bersama, misalnya pelatihan untuk meningkatkan manajemen toko buku yang lebih profesional. Bagi daerah yang belum memiliki cabang IKAPI, GATBI dapat mengambil prakarsa bekerjasama dengan penerbit mengadakan pameran buku secara berkala. Pameran tersebut tidak hanya di ibukota propinsi tetapi juga ke ibukota kabupaten dan kecamatan. Karena kondisi toko buku di daerah masih sangat lemah, maka melalui GATBI dapat meminta dukungan kepada Pemerintah Daerah dan instansi vertikal terkait dengan perbukuan untuk pengembangan.

e. Badan Pertimbangan Pengembangan Perbukuan Daerah

Salah satu saran dari Seminar Pengembangan Perbukuan Daerah yang diadakan di Jawa Timur pada tahun anggaran 1990/1991 ialah perlu dibentuk Badan Pertimbangan dan Pengembangan Perbukuan Daerah disingkat BP-3D. Badan ini bertugas membantu Gubernur merumuskan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian perbukuan daerah. Keanggotaan dari badan ini terdiri atas unsur -unsur Pemerintah dan organisasi profesi seperti Bappeda, Dinas P dan K, Kanwil Depdikbud, Kanwil Penerangan, Kanwil Agama, IKAPI, GATBI, dan organisasi penulis dan penerjemah. Mengingat kondisi perbukuan daerah saat ini masih sangat tertinggal, kiranya sudah saatnya ada badan seperti yang disarankan oleh seminar tersebut di atas.

Adanya unsur Pemerintah dalam badan tersebut akan berperan sebagai motivator dan fasilitator dalam menggerakkan perkembangan perbukuan di daerahnya. Peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan karena pada satu pihak dunia perbukuan belum menarik dunia usaha sedang pada pihak lain buku masih tetap memegang peranan penting dalam menciptakan masyarakat membaca yang pada gilirannya menjadi masyarakat belajar sebagai salah satu indikator suatu masyarakat modern.

4. Penutup

Uraian secara garis besar tentang perkembangan perbukuan di daerah menggambarkan masih banyak PR yang harus dilakukan agar buku dapat merata di seluruh tanah air.

Bagi daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pengembangan perbukuan saat ini, Pemerintah Daerah bersama jajarannya masih harus campur tangan dalam arti sebagai motivator dan fasilitator dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan perbukuan di daerahnya.

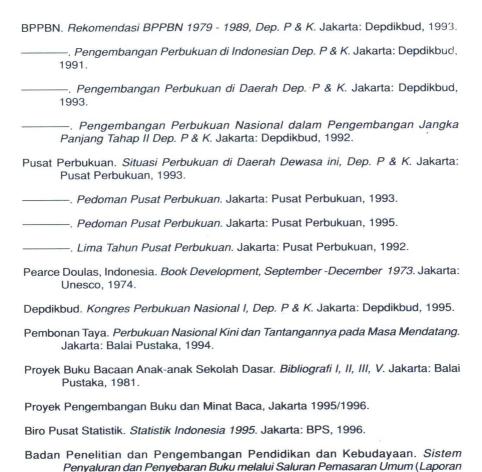
Bilamana kegemaran membaca masyarakat telah berkembang dan buku telah dirasakan sebagai kebutuhan maka bisnis buku akan menarik minat dunia usaha untuk menginvestasikan modalnya. Jika kondisi ini telah tercapai, perkembangan perbukuan akan lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar.

Sangat diperlukan kerjasama yang harmonis di antara pelaku perbukuan mengingat setiap unsur dan komponen saling tergantung satu sama lain. Kemajuan pada salah satu unsur akan mendorong kemajuan unsur dan komponen lainnya. Sebaliknya kelambanan dan kemacetan pada salah satu unsur akan berpengaruh pada unsur dan komponen lainnya.

Mengingat Undang-Undang perbukuan belum ada maka hubungan antara berbagai profesi perbukuan hanya didasarkan pada saling percaya perlu ditingkatkan disertai etika bisnis yang tinggi diantara pelaku-pelaku perbukuan.

Setiap profesi di bidang perbukuan perlu meningkatkan keahliannya. Dalam hubungan ini organisasi profesi yang ada mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengkoordinasikan pengembangan itu. Pengembangan perbukuan sebagaimana yang diamanatkan oleh GBHN 1993, masih memerlukan waktu agar buku dapat disebarluaskan merata di seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepustakaan



Penelitian 1981). Jakarta: 1981 tidak diterbitkan.

